



# RENJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2027 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Renja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sektor ketahanan pangan dan perikanan, melalui upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas serta penguatan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan Renja ini di masa yang akan datang. Semoga Renja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Perikanan Kabupaten Agam  
**ROSWANESWIRA, S.Pi, M.Si**  
Pembina Tk I/ IV.b  
NIP. 19721209 200604 2 007

## DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>2. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .....	24
2.3 Isu isu Strategis Penyelenggaraan Tupoksi DKPP .....	40
2.4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 .....	42
<b>3. TUJUAN DAN SASARAN PD .....</b>	<b>63</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.....	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	65
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	58
<b>4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>75</b>
4.1. Keterkaitan Renja dengan RPJMD Kab. Agam 2025-2029.....	75
4.2. Isu Strategis Program Prioritas DKPP Tahun 2027 .....	63
4.3. Langkah Strategis dan hasil yang diharapkan .....	79
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1. Kaidah dan Pelaksanaan .....	63
5.2. Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut.....	88

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025- 2029.

Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan

nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan pada perkuatan fondasi transformasi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam memenuhi tanggungjawabnya pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan pembangunan tahunan, sekaligus sebagai instrumen penyelarasan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyusunan Renja juga wajib memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu strategis sektoral, arah kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan layanan publik yang menjadi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berjalan. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat sasaran, terukur, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan di daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2027 ini adalah:

1. Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 102 Tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Data Alokasi Umum yang Ditentukan penggunaannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
13. Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Agam Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2026 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2027 adalah :

1. Memberikan panduan bagi karyawan dan karyawan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang kebijakan, tujuan, sasaran, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2027 atau penyusunan RKA SKPD;
3. Menciptakan kepastian kebijakan pemerintah bagi *stakeholders* di bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2027 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Bab V : Penutup

## **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, termasuk keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Setiap indikator dinilai berdasarkan tingkat pencapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja, yang tersusun sesuai sasaran dan program dalam dokumen rencana strategis.

Secara garis besar pencapaian target program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.277.175.695,- atau persentase 88,41% dan realisasi fisik 93,68% dari alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 4.838.030.834,00,-. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan 8 (delapan) program, dengan pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85.0	112	111	89,7	119,19%	110	92,45	115,95
	Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pangan pokok atau pangan lainnya yang tersedia dan tersalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (%)	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	104,5	104,5
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan berbasis sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumberdaya lokal yang tersedia (Laporan)	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (Laporan)	1	N/A	1	1	100%	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Subkegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (KK)	130	N/A	40	65	163%	130	162	125
	Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan Stok, Pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	1	N/A	1	1	100	1	1	100
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kab/kota	Jumlah cadangan pangan kab/kota yang tersedia (ton)	8	2	5	5,45	109	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	8	2	5	5,45	109	10	10	100
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Nilai Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/hari)	2.100	2.539	2100	1.885	9	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (Laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	80	35	40	100	250	45%	83,89	186
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/kota	Jumlah pelaku Usaha pangan segar yang diawasi (pelaku Usaha)	10	10				N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Rekomendasi Perizinan	Jumlah Rekomendasi	1	N/A	1	11	1100	1	1	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)								
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Pangan (%)	6,5% (6 Nagari)	14,50	16,9	90%	532,54	19,40	1,09	0,06
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta yang tersusun (Peta)	1	1	1	1	100%	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Penyusunan , pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisa Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
	Penanganan kerawanan pangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Penanganan kerawanan Pangan yang dilaksanakan (kali)	1	1	1	1	100	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
	Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kab/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kab/kota (laporan)	1	N/A	1	1	100	1	1	100
	Subkegiatan Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi (dokumen)	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100
	Penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota (dokumen)	12	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN (%)	100%	85%	88	100	114	100	100	100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>					100	100	100
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn (orang/bulan)	24 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	100%	25 Orang/Bulan	25	100
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD & laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD (laporan)	12	3	12	12	100	10	10	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja (%)</b>	<b>90%</b>		88	88	100	90	90	100
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	1	1	100%	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	2	1	1	100	1	1	100
	Subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	5	1	1	100	1	1	100
	Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	3	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	4	1	1	N/A	N/A	4	4	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintah daerah (%)	100%					90	90	100
	Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1	3	12	12	100	12	12	100
	Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	4	12	12	100	12	12	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	90%					90	90	100
	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	43	5	5	5	100	3	3	100
	Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	2	2	1	2	200	1	1	100
	Subkegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100
	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan tangkap (ton)	8.170	8.140	8.160	8.139,98	99,75	8170	8175,00	100,06
	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan (nelayan)	43	N/A	75	75	100	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Pengembangan Kapasitas nelayan kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	30	N/A	66	60	100	30	30	100
	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil (unit)	13	N/A	N/A	N/A	N/A	32	32	100
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1	30250	30500	33409,39	109,54	30750	33699,91	109,59
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan (orang)	1	N/A	3,18	3	100	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitasnya (kelompok)	1	N/A	3	5	100	1	0	0
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produktivitas rata-rata unit usaha pembudidayaan ikan dalam satu tahun (ton/unit usaha/tahun)	2,65 Ton	9 Unit	4 Unit	4 Unit	100	N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	2	3 Unit	8	10	125%	2	2	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB pada tahun berjalan (%)	20%	100%	100	N/A	N/A	20	29	145
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	10					N/A	N/A	N/A
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	31,03	318	328	328	100	338	338	100
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Baku ikan segar yang diolah	2268	N/A				N/A	N/A	N/A
	Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (ton)	28,640 Ton	N/A	28140	31895	113%	28640	28326	99
	Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (pelaku usaha)	8 Pelaku Usaha	N/A	20	23	115%	8	8	100

Rekapitulasi capaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah berada pada kategori baik dan selaras dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Penilaian ini juga diperkuat oleh hasil evaluasi Tim APIP Daerah melalui Laporan **Nomor 700.1.2.1/62/ITDA-2025 tanggal 22 Maret 2025**, yang memberikan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar **75,20** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dijalankan secara efektif dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah daerah.

Tingkat keberhasilan ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung, seperti ketepatan perencanaan, koordinasi lintas bidang, efektivitas penggunaan anggaran, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Di sisi lain, masih terdapat beberapa program yang belum mencapai target karena kendala efisiensi anggaran, keterbatasan sumber daya, maupun dinamika pelaksanaan di lapangan. Rincian berikut memuat evaluasi menyeluruh terhadap realisasi program termasuk analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tercapainya target, terpenuhinya sebagian target, maupun tidak tercapainya hasil yang direncanakan. Dengan demikian, gambaran kinerja Tahun 2025 dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui uraian program berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam hingga Tahun 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menunjukkan fluktuasi kinerja. Pada tahun **2023 capaian program mencapai 100%**, kemudian tetap menjadi 100% pada tahun 2024, dan kembali meningkat hingga mencapai 100% pada

tahun 2025. Capaian tersebut bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan, yaitu sebesar 88%.

Evaluasi kinerja mengindikasikan bahwa pelaksanaan program penunjang telah berjalan efektif dalam mendukung kegiatan operasional dinas, baik dari aspek penyediaan sarana kerja, pemenuhan kebutuhan logistik, pengelolaan administrasi perkantoran, maupun peningkatan dukungan terhadap pelaksanaan program strategis lainnya. Capaian yang konsisten ini menjadi dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk mempertahankan kinerja pelayanan internal yang efisien dan responsif, guna memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan optimal.

## **2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan menunjukkan capaian yang berfluktuasi antar tahun. Pelaksanaan program ini baru terealisasi pada tahun 2024 dan 2025 dengan capaian sebesar 1 nagari, sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan arah kebijakan dan indikator kinerja program agar lebih mencerminkan substansi upaya penguatan ketahanan pangan daerah.

Faktor pendukung capaian target antara lain efektivitas koordinasi perencanaan di tingkat nagari, dukungan kebijakan nasional terkait penguatan kemandirian pangan, serta komitmen pemerintah nagari dalam menyiapkan kelembagaan pangan. Sebaliknya, faktor penghambat bagi

subkegiatan yang belum terealisasi meliputi keterbatasan anggaran, kebutuhan verifikasi lapangan tambahan, serta prioritas anggaran yang dialihkan pada kegiatan yang lebih mendesak. Secara umum, program ini sudah memenuhi target indikator, namun realisasi subkegiatan masih perlu diperkuat untuk memberikan dampak lebih besar terhadap penguatan pangan nagari.

### **3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat menunjukkan kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Tabel diatas menunjukkan indikator penurunan konsumsi beras tahun 2025 sebesar 94,45, lebih rendah dari target (111) yang mana indikator ini bersifat negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi lebih rendah menandakan keberhasilan dalam mendorong diversifikasi pangan.

Faktor pendukungnya antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), sosialisasi B2SA yang masif, pembinaan ketahanan pangan keluarga yang realisasinya mencapai 163% dari target, serta ketersediaan cadangan pangan daerah yang terealisasi 109%. Kegiatan pemantauan harga dan pasokan yang berjalan optimal juga berkontribusi menjaga stabilitas konsumsi. Adapun faktor penghambat muncul dari masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal, fluktuasi harga bahan pangan strategis, dan keterbatasan kualitas sarana distribusi pangan di beberapa kecamatan. Namun secara keseluruhan, program ini menunjukkan efektivitas intervensi dan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan.

#### **4. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sampai dengan Tahun 2025, Program ini merupakan salah satu yang paling berhasil, dengan capaian indikator hanya 1,09% nagari rawan pangan, jauh lebih rendah dari target Renstra 19,40%. Berdasarkan tabel diatas juga menunjukkan bahwa hampir seluruh subkegiatan, termasuk penyusunan SKPG, koordinasi penanganan kerawanan pangan, dan penyaluran cadangan pangan, terealisasi 100%.

Capaian tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu perbaikan kualitas data kerawanan pangan, meningkatnya efektivitas koordinasi lintas sektor, tersedianya cadangan pangan daerah yang cukup, serta response time yang cepat dalam penanganan potensi kerawanan. Faktor penghambat relatif kecil, namun mencakup ketidakpastian kondisi ekonomi masyarakat dan dampak bencana alam yang dapat memengaruhi akses pangan. Meskipun demikian, program ini tetap menunjukkan pencapaian jauh melampaui target yang ditetapkan.

#### **5. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sampai dengan Tahun 2025, Program Pengawasan Keamanan Pangan menunjukkan tren capaian yang berfluktuasi namun secara umum memperlihatkan peningkatan signifikan pada akhir periode. Pada tahun 2023, realisasi program tercatat sebesar 0%, yang menandakan bahwa kegiatan pengawasan keamanan pangan tidak terlaksana pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2024, capaian kinerja meningkat tajam sebesar 100%, namun pada tahun 2025

mengalami penurunan menjadi 83,89%, tetapi melampaui target tahunan yang telah ditetapkan.

Faktor pendukungnya mencakup meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya keamanan pangan, bertambahnya jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin, serta tersedianya pedoman teknis pengawasan. Namun demikian, terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan tenaga pengawas keamanan pangan, tidak tersedianya sarana uji laboratorium daerah, dan keterbatasan kapasitas pengujian lapangan. Meski begitu, capaian indikator tetap melampaui target secara signifikan dan menggambarkan penguatan sistem pengawasan sepanjang tahun 2024.

## **6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan, di mana realisasi mencapai 8.120 melampaui target 8.118 Ton. Tahun 2024 dan 2025 realisasi kembali stabil di kisaran 8.139–8.175 Ton, dengan capaian akhir tahun 2025 sebesar 8.175 dari target 8.170 Ton , atau mencapai sekitar 101% dari target.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi yang konsisten mendekati target setiap tahunnya. Faktor yang mendukung tingginya capaian ini antara lain kondisi cuaca yang relatif stabil pada sebagian besar bulan, tersedianya BBM bersubsidi, serta meningkatnya partisipasi kelompok nelayan dalam pengelolaan

sumber daya perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan. Hambatan yang dihadapi mencakup fluktuasi harga ikan serta terbatasnya fasilitas rantai dingin di beberapa lokasi pendaratan sehingga mempengaruhi mutu hasil tangkapan. Kendati demikian, secara umum program ini berhasil mencapai target dan mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap daerah.

## **7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025, Program budidaya menunjukkan kinerja melampaui target dengan capaian indikator sebesar 109,59%. Tabel menunjukkan sebagian besar subkegiatan terealisasi dengan baik, terutama kegiatan dukungan sarpras budidaya dan pembinaan kelompok pembudidaya.

Faktor yang mendukung capaian tinggi ini mencakup kondisi kualitas air yang stabil, ketersediaan benih unggul, tidak terjadinya kematian ikan massal, serta meningkatnya minat masyarakat dalam usaha budidaya. Hambatan muncul dari tingginya harga pakan, konsumsi pakan yang meningkat pada musim tertentu, dan fluktuasi harga jual ikan. Walaupun terdapat tantangan tersebut, program tetap memperlihatkan performa yang sangat baik dan berkontribusi besar terhadap ketahanan sektor perikanan.

## **8. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diukur melalui indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha

Perikanan terhadap Peraturan menunjukkan hasil yang belum konsisten sepanjang periode pelaksanaan.

Pada tahun 2023 dan 2024, program pengawasan tidak terlaksana, yang ditunjukkan dengan realisasi sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dukungan anggaran dan sumber daya pengawas perikanan di lapangan, sehingga kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Pada tahun 2025, program kembali dilaksanakan dengan realisasi capaian 29%, diatas target yang ditetapkan sebesar 20%. Peningkatan ini menunjukkan adanya efektivitas kegiatan pengawasan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan sosialisasi peraturan perikanan, pemeriksaan administrasi izin usaha, serta pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

#### **9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai Tahun 2025, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Tabel capaian kinerja memperlihatkan bahwa indikator program berhasil mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi ini didukung oleh pelaksanaan subkegiatan yang berjalan optimal, seperti fasilitasi peningkatan mutu hasil perikanan, pembinaan pelaku usaha pengolahan, serta dukungan terhadap akses pemasaran produk perikanan di tingkat lokal maupun luar daerah.

Capaian yang tinggi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, antara lain meningkatnya minat masyarakat dalam usaha pengolahan hasil perikanan, ketersediaan bahan baku yang relatif stabil sepanjang tahun, serta adanya pendampingan berkelanjutan terkait standar mutu dan

keamanan pangan. Selain itu, perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan promosi dan kolaborasi dengan pelaku UMKM turut berkontribusi pada peningkatan nilai tambah produk perikanan di Kabupaten Agam.

Meskipun capaian program telah memenuhi target, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi tantangan dalam pengembangannya, seperti variasi ketersediaan bahan baku pada musim tertentu, keterbatasan sarana produksi bagi pelaku usaha skala kecil, serta fluktuasi permintaan pasar. Namun, secara keseluruhan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada tahun 2025 dapat dinilai berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing produk perikanan serta kesejahteraan pelaku usaha di sektor tersebut.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pada tahun sebelumnya, secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Beberapa target telah tercapai sesuai rencana, namun masih ada indikator yang memerlukan perhatian dan peningkatan ke depan. Evaluasi ini tidak hanya melihat capaian angka, tetapi juga bagaimana proses pelayanan dilakukan, pemanfaatan sumber daya, serta tanggapan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Melalui penilaian indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja utama, dapat terlihat dengan lebih jelas bagian mana yang sudah berjalan efektif dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan pada tahun perencanaan, agar pelayanan di bidang

ketahanan pangan dan perikanan dapat semakin responsif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Agam. Kinerja pelayanan dalam aspek Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Agam dijabarkan dalam indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja utama sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam**

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Indeks Ketahanan Pangan	92	86,93	86,94	86,95	86,92	71,6	86,94	86,95
2	Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan (%)	4,80	4,66	4,71	4,76	4,61	-	4,71	4,76
3	Prevalence of Undernourishment (PoU)	-	9,10	9,03	8,66	9,24	8,35	9,03	9,05
4	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	38.660	41.854	41.955	42.090	41.549	41.874,91	41.955	42.090
5	Nilai SAKIP Perangkat daerah	76,5	77	79	81	75,20	-	79	81

(Sumber Data: Bidang Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, 2025).

**Tabel 3.**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Kabupaten Agam**

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Bidang Pangan</b>									
1	<b>Prevalence of Undernourishment (PoU)</b>	-	9,10	9,03	8,66	9,24	8,35	9,03	8,66
2	Persentase cadangan pangan Daerah yang tersimpan dan dikelola di lumbung pangan aktif (%)	15	15	17	20	18,58		17	20
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,7	85	86	86,0	81	88,1	86	86,0
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	90	*80	81	82	90		100	82
5	Persentase Daerah Rentan Pangan (%)	10	6,5	5,4	4,3	1,22	1,2	5,4	4,3
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5	77	79	81	75,20	*	79	81
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	89	89,5	90	88,70	-	89,5	90
8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)	90	100	100	100	100		100	100
<b>B. Bidang Perikanan</b>									
10	Jumlah Produksi perikanan (Ton)	38.660	41.854	41.955	42.090	41.549	41.874,91	41.955	42.090
11	- Perikanan budidaya (ton)	30.500	33.684	33.775	33.900	33.409,39	33.699,91	33.775	33.900
12	- Perikanan Tangkap (ton)	8.160	8.170	8.180	8.190	8.139,98	8.175	8.180	8.190
13	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap peraturan	20	20	30	45	-		30	45
14	Angka Konsumsi ikan	45	*31,03	31,62	32,19	44,12		31,62	32,19

Keterangan : \*(Penurunan Target pada Tahun 2025 disebabkan adanya reformulasi perhitungan)  
(Sumber Data: Bidang Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, 2025).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan selama periode tahun 2024 hingga 2025, secara umum dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup efektif serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Capaian dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2024–2025 memberikan gambaran atas efektivitas pengelolaan sumber daya di bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Indikator kinerja yang ditetapkan memiliki makna strategis sekaligus fungsi pengukuran yang berbeda, sesuai dengan aspek pembangunan yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian tujuan besar dinas diukur melalui indikator kinerja utama, sedangkan indikator kinerja kunci lebih menitikberatkan pada hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagai dasar evaluasi yang objektif dan bahan penyempurnaan kebijakan pada periode perencanaan berikutnya, uraian per item indikator dapat dilihat sebagai berikut.

**a. Indikator Kinerja Utama**

**1) Indeks Ketahanan Pangan**

Indeks Ketahanan Pangan Daerah menunjukkan rata-rata capaian yang mendekati target yang ditetapkan dengan realisasi 86,92 dari target 92 pada tahun 2024 tetapi mengalami penurunan sebesar 71,6 dari target 94 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan telah berjalan dengan baik dan efektif. Meskipun demikian, masih terdapat sedikit kesenjangan antara target dan realisasi, yang menandakan perlunya optimalisasi lebih lanjut agar capaian peningkatan dapat terjaga secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Capaian yang positif ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan, semakin baiknya infrastruktur distribusi yang memudahkan akses masyarakat terhadap bahan pangan, serta kerja sama lintas sektor yang mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi dan beragam, serta adanya dukungan data dan pemantauan ketahanan pangan secara rutin, turut memperkuat pencapaian indikator ini.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat capaian Indeks Ketahanan Pangan Daerah seperti ketergantungan pada kondisi iklim dan cuaca yang sering kali mempengaruhi produksi pangan lokal, kesenjangan akses pangan masih dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Fluktuasi harga pangan juga kerap mengurangi daya beli masyarakat, dan diversifikasi pangan lokal yang belum optimal menyebabkan pola konsumsi masih bergantung pada komoditas tertentu. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi kendala dalam memperluas dan mengintensifkan program peningkatan ketahanan pangan secara merata di semua wilayah.

## **2) Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan**

Kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren capaian yang relatif memuaskan dengan kecenderungan realisasi yang mendekati target, pada tahun 2023 realisasi sebesar 4.81% dibandingkan target 4.75% kemudian pada tahun 2024

realisasi sedikit menurun menjadi 4.61%, sedikit di bawah target 4.8%, namun tetap menunjukkan peran perikanan yang konsisten dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja positif ini tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung. Potensi sumber daya perikanan yang melimpah, dukungan program pemerintah dalam pengembangan budidaya dan tangkap, serta adanya pembinaan kelompok nelayan menjadi motor penggerak peningkatan produksi. Selain itu, berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan turut memberikan nilai tambah yang memperbesar kontribusi terhadap PDRB. Akses pasar yang lebih terbuka dan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat juga mendorong subsektor perikanan semakin berperan dalam perekonomian daerah.

Meski demikian, terdapat pula faktor penghambat yang menyebabkan kontribusi perikanan tidak selalu stabil. Fluktuasi produksi akibat kondisi cuaca dan musim penangkapan, keterbatasan infrastruktur perikanan di beberapa wilayah, serta ketergantungan pada pasar lokal membuat kontribusi berpotensi menurun di tahun-tahun tertentu. Selain itu, tantangan lain seperti harga jual ikan yang tidak stabil, keterbatasan kapasitas SDM nelayan, dan lemahnya akses terhadap teknologi modern juga berpengaruh terhadap capaian kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB.

### **3) Prevalence of Undernourishment (PoU)**

Tingkat Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi kekurangan konsumsi pangan kronis merupakan indikator penting untuk menggambarkan tingkat kerentanan pangan masyarakat pada suatu

wilayah. Berdasarkan data yang tersedia dalam kurun waktu 2024–2025, kondisi undernourishment di Kabupaten Agam memperlihatkan dinamika yang cukup baik.

Pada tahun 2023, nilai PoU mulai menunjukkan tren perbaikan dengan penurunan dari 9,86 menjadi 9,24%. Penurunan ini mengisyaratkan mulai pulihnya fungsi distribusi pangan dan membaiknya kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangan pokok, baik melalui peningkatan pendapatan maupun adanya program intervensi pemerintah seperti bantuan sosial, optimalisasi cadangan pangan daerah, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, nilai PoU yang masih berada di kisaran 9% menunjukkan bahwa kondisi kerawanan pangan belum sepenuhnya teratasi, terutama pada kelompok rumah tangga miskin, masyarakat di wilayah terpencil, serta pekerja informal yang sangat bergantung pada fluktuasi harga pangan.

Secara umum, dinamika PoU dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa permasalahan undernourishment tidak hanya terkait dengan aspek ketersediaan pangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, perilaku konsumsi, serta kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan bergizi seimbang. Oleh karena itu, penanganan undernourishment memerlukan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya berfokus pada intervensi bantuan pangan jangka pendek, tetapi juga penguatan sistem ketahanan pangan rumah tangga melalui stabilisasi harga pangan pokok, perluasan diversifikasi pangan lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, serta edukasi dan kampanye gizi berkelanjutan.

#### 4) Jumlah Produksi Perikanan (Ton)

Produksi perikanan dalam periode 2024-2025 menunjukkan capaian yang relatif stabil dan meningkat. Pada tahun 2024 realisasi produksi perikanan tercatat 41.549,37 Ton masih melebihi **target 38.390 Ton**. Pada tahun 2025 terjadi kenaikan sebesar 41.874,91 Ton, melampaui **target 38.660 Ton**. Secara umum, capaian ini menunjukkan produksi perikanan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, seperti tersedianya lahan perikanan yang cukup luas, potensi sumber daya perikanan yang cukup memadai, meningkatnya dukungan pemerintah melalui program pengembangan sarana produksi, serta adanya pembinaan kepada kelompok perikanan. Selain itu, meningkatnya permintaan pasar juga menjadi pendorong pertumbuhan produksi.

Namun demikian, terdapat faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan benih dan pakan berkualitas, yang pada beberapa tahun mengalami kendala, kondisi cuaca dan musim, yang sering kali menyebabkan fluktuasi hasil tangkapan. Keterbatasan armada tangkap modern dan teknologi pascapanen juga membatasi produktivitas. Selain itu, ancaman penurunan kualitas ekosistem perairan akibat pencemaran maupun potensi overfishing perlu menjadi perhatian agar kontribusi subsektor perikanan tangkap tetap terjaga secara berkelanjutan. Fluktuasi harga input produksi dan keterbatasan teknologi budidaya juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kondisi lingkungan perairan yang rentan

terhadap pencemaran dan perubahan iklim turut memengaruhi keberlanjutan produksi.

## 5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian kinerja akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menunjukkan tren perbaikan yang positif dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 realisasi sebesar 75, meskipun masih di bawah target 75 namun menunjukkan adanya progres konsisten dalam penataan sistem manajemen kinerja. Pada tahun 2025, capaian realisasi meningkat signifikan menjadi 75,20, mendekati target 77, yang menandakan bahwa langkah-langkah pembenahan seperti peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, serta perbaikan tata kelola pelaporan mulai memberikan hasil nyata.

Secara umum, perkembangan nilai SAKIP menggambarkan komitmen berkelanjutan perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain konsistensi penerapan siklus manajemen kinerja secara menyeluruh, peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan indikator kinerja yang terukur, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pelaporan. Melalui penguatan aspek-aspek tersebut, diharapkan capaian SAKIP pada periode Renstra 2025–2029 dapat terus meningkat dan berada pada kategori yang lebih baik.

## b. Indikator Kinerja Utama

### 1) Persentase Cadangan Pangan Masyarakat

Persentase cadangan pangan masyarakat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu, serta menggambarkan tingkat ketahanan pangan pada level komunitas. Selama periode tahun 2024–2025, kondisi cadangan pangan masyarakat mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh ketersediaan komoditas strategis, stabilitas harga, kondisi produksi pertanian/perikanan, serta efektivitas program intervensi pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, persentase cadangan pangan masyarakat sebesar 16,17% melampaui target sebesar 15%. Hal ini dipengaruhi oleh pasokan pangan yang cukup, didukung musim panen yang berjalan baik serta distribusi pangan yang lancar. Program pemerintah daerah dalam bentuk penguatan lumbung pangan dan pemantauan harga pangan, Secara umum, cadangan pangan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rata-rata di atas batas aman yang direkomendasikan.

Memasuki tahun 2025, persentase cadangan pangan masyarakat menunjukkan peningkatan sebesar 18,58 melampaui target sebesar 15%. Peningkatan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya produksi pangan lokal, perbaikan sistem distribusi, serta optimalisasi pemanfaatan sarana penyimpanan seperti lumbung pangan dan cold storage untuk komoditas perikanan. Selain itu, implementasi kegiatan diversifikasi pangan dan edukasi konsumsi pangan bergizi turut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga stok pangan rumah

tangga. Program perlindungan pangan seperti mitigasi dampak inflasi dan pengendalian pasokan juga memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan cadangan pangan.

Secara keseluruhan, tren 2024–2025 menunjukkan bahwa cadangan pangan masyarakat mengalami perbaikan. Peningkatan ini menjadi indikator positif terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah yang lebih kuat, mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga, dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan.

## **2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 81 dibandingkan target 86,7, menandakan adanya penurunan pola konsumsi pangan masyarakat yang cukup nyata. Meski demikian, pada tahun 2025 realisasi mengalami kenaikan menjadi 88,1, di atas target yang ditetapkan sebesar 85, sehingga menandakan adanya tantangan untuk mempertahankan capaian yang konsisten.

Secara umum, pencapaian PPH dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Edukasi gizi yang semakin gencar dilakukan pemerintah dan lembaga terkait, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat, serta ketersediaan pangan bergizi yang lebih baik di pasar menjadi faktor utama peningkatan skor pada 2024–2025. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dalam program ketahanan pangan turut mendorong perbaikan konsumsi pangan yang lebih beragam.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan capaian PPH tidak stabil. Fluktuasi daya beli masyarakat akibat perubahan harga pangan, keterbatasan akses pangan bergizi di beberapa wilayah, serta masih rendahnya diversifikasi pangan lokal membuat konsumsi masyarakat cenderung kembali monoton. Selain itu, perubahan kebiasaan konsumsi membutuhkan waktu dan konsistensi, sehingga tanpa pendampingan berkelanjutan, capaian yang sudah baik berpotensi membaik seperti terlihat pada tahun 2025.

### **3) Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)**

Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan pada tahun 2024-2025 tidak ada, dan mulai aktif pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 90%. Hal ini menggambarkan perbaikan dari sisi pengawasan lapangan, peningkatan kapasitas uji sampel aman pangan serta intensifikasi kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha, distributor, dan pedagang. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh implementasi yang lebih optimal terhadap program Pengawasan Keamanan Pangan Segar melalui kegiatan sampling berkala dan pembinaan pelaku usaha.

Persentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah berjalan efektif dalam mengurangi peredaran pangan yang mengandung residu pestisida melebihi batas aman, bahan tambahan pangan berbahaya, maupun cemaran mikroba. Hal ini mencerminkan semakin tingginya

pemahaman konsumen akan pentingnya memilih pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

Secara umum, capaian tahun 2024 memberikan dasar yang kuat bagi DKPP untuk terus meningkatkan sistem pengawasan keamanan pangan, memperluas cakupan sampling, memperkuat regulasi daerah, dan memastikan pangan segar yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu yang ditetapkan demi mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

#### **4) Persentase Daerah Rentan Pangan**

Persentase Daerah Rentan Pangan merupakan persentase jumlah nagari yang masuk dalam prioritas 1,2 dan 3 dari total nagari di Kabupaten Agam (menggunakan basedata 82 Nagari). Persentase Daerah Rentan Pangan mengukur proporsi wilayah yang tergolong rentan pangan berdasarkan peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas), sehingga lebih stabil, mudah dibandingkan antar tahun, dan mampu menggambarkan kondisi ketahanan pangan secara lebih komprehensif.

Indikator ini bersifat negatif, di mana semakin kecil persentasenya menunjukkan kondisi ketahanan pangan daerah yang semakin baik. Melalui perubahan tersebut, pengukuran kinerja program diharapkan menjadi lebih akurat, konsisten, serta relevan terhadap arah kebijakan penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Agam. Persentase Daerah Rentan Pangan (%)” dengan hasil realisasi sebesar 1,22% pada tahun 2024, dihitung dari satu nagari yang tergolong rawan pangan dibandingkan dengan total 82 nagari yang ada di Kabupaten Agam.

## **5) Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mulai terdokumentasi pada tahun 2023. Berdasarkan hasil survei, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,70, yang secara umum masuk dalam kategori “Baik” sesuai dengan klasifikasi PermenPANRB. Pada tahun 2025, nilai IKM mengalami peningkatan menjadi 88,73, menunjukkan adanya penguatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh penerima layanan.

Kenaikan nilai IKM ini mengindikasikan bahwa upaya pembenahan prosedur layanan, peningkatan responsivitas petugas, serta kemudahan akses informasi dan pengurusan administrasi mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan ini juga menjadi dasar evaluasi bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi, sehingga dibutuhkan inovasi layanan yang lebih adaptif dan berbasis digital untuk menjaga konsistensi kepuasan pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

## **6) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)**

Indikator persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN digunakan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat terpenuhi melalui penyediaan sarana, prasarana, serta dukungan operasional yang memadai. Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan

kegiatan administrasi dan dukungan manajemen dalam menunjang kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan data capaian tahun 2024–2025, terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, capaian sebesar 100 persen dari target 88 persen, kemudian pada tahun 2025 tetap menjadi 100 persen dengan target 100 persen, menunjukkan adanya upaya dalam menjaga ketersediaan sarana dan dukungan operasional bagi ASN serta pelaksanaan kegiatan perkantoran.

Secara keseluruhan, tren capaian selama periode 2024–2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang positif, menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan peningkatan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya agar target 100 persen dapat dicapai secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

#### **7) Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang telah Memiliki Izin Usaha terhadap Peraturan**

Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang Telah Memiliki Izin Usaha terhadap peraturan digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan. Indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan serta keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku usaha perikanan.

Berdasarkan data capaian tahun 2023, diketahui bahwa realisasi mencapai 31 persen, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 20 persen, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 155 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku dibandingkan dengan target yang direncanakan. Sedangkan pada Tahun 2024 Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang Telah Memiliki Izin Usaha terhadap peraturan sudah tidak digunakan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara intensif oleh petugas di lapangan, termasuk sosialisasi peraturan, monitoring izin usaha perikanan, serta upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, diharapkan tata kelola sumber daya perikanan di Kabupaten Agam menjadi lebih tertib, berkelanjutan, dan mendukung pengembangan usaha perikanan yang berdaya saing.

## **8) Angka konsumsi Ikan**

Angka konsumsi ikan menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2024–2025. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 43.29 kg/kapita/tahun dibanding target 44 kg/kapita/tahun. Pada 2024 capaian realisasi kembali naik menjadi 44.12 kg/kapita/tahun, sangat mendekati target 45 kg/kapita/tahun. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan masyarakat terus membaik, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat gizi dari ikan.

Peningkatan capaian ini didorong oleh sejumlah faktor pendukung. Program pemerintah yang gencar dalam kampanye “Gemarikan” (Gerakan

Memasyarakatkan Makan Ikan) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Selain itu, distribusi ikan yang semakin merata, harga yang relatif terjangkau, serta meningkatnya variasi produk olahan ikan di pasaran turut mendorong peningkatan konsumsi. Dukungan dari subsektor perikanan budidaya dan tangkap yang menjaga ketersediaan pasokan ikan juga berperan besar dalam menjaga tren positif ini.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat. Perbedaan konsumsi antarwilayah masih cukup nyata, di mana daerah pesisir umumnya lebih tinggi dibandingkan daerah pedalaman. Akses terhadap ikan segar maupun olahan di beberapa wilayah terpencil juga masih terbatas. Selain itu, daya beli masyarakat pada kelompok berpendapatan rendah dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membeli ikan secara rutin serta preferensi sebagian masyarakat yang masih lebih memilih sumber protein lain seperti daging ayam atau sapi dibanding ikan.

### **2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan aksetabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Agam), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) dengan PD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan pangan dan perikanan dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Program	Isu-isu Penting
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya struktur organisasi DKPP belum sepenuhnya mendukung kebutuhan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan perikanan yang semakin kompleks
	Minimnya pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas SDM
	Distribusi dan jumlah SDM belum ideal
	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang layanan belum optimal.
	Proporsi pengelolaan keuangan dan efektivitas belanja penunjang DKPP masih belum optimal untuk mendukung percepatan program strategis ketahanan pangan dan perikanan.
	Keterbatasan PAD sehingga mempengaruhi kapasitas fiskal untuk program prioritas
	Belum optimalnya penerapan digitalisasi layanan dan sistem informasi DKPP
	Sistem pengendalian pengawasan internal dan manajemen resiko belum berjalan optimal
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Belum adanya regulasi ketahanan pangan

Program	Isu-isu Penting
	Layanan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) belum merata
	Kurangnya edukasi gizi dan pola makan yang sehat di masyarakat
	Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Masih adanya daerah rawan pangan kabupaten agam
	Kemiskinan yang menjadi faktor utama kerawanan pangan, sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli makanan
	Ketergantungan pada impor pangan, yang membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pangan global dan gangguan pasokan
	Dampak perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir, yang dapat mengganggu produksi pangan dan meningkatkan kerawanan pangan
	Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dalam penanganan kerawanan pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Maraknya pemakaian bahan berbahaya pada bahan pangan segar
	Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan keamanan pangan
	Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran keamanan pangan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha
	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan, sehingga mudah tertipu oleh produk pangan yang tidak aman
	Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi tentang keamanan pangan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu air laut dan perubahan pola musim, yang dapat mengganggu habitat ikan dan pola migrasi
	Meningkatnya intensitas fenomena alam ekstrem, seperti badai dan gelombang pasang, yang dapat merusak infrastruktur perikanan dan mengganggu aktivitas nelayan
	Ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang sumber daya ikan dan aktivitas penangkapan ikan masih terbatas

Program	Isu-isu Penting
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pencemaran lingkungan akibat kegiatan budidaya ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan pakan yang berlebihan, pupuk kimia, dan obat-obatan
	Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas untuk mendukung program pengelolaan perikanan budidaya
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap regulasi masih rendah
	Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM pengawasan
	Masih tingginya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan/ ilegal
	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan
	Monitoring dan evaluasi pengawasan belum berbasis data terpadu
	Koordinasi lintas sektor dan kewenangan belum terintegrasi
	Degradasi kualitas ekosistem dan habitat perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kurangnya akses terhadap teknologi pengolahan modern bagi pelaku usaha perikanan skala kecil
	Kurangnya SDM yang terampil dan kompeten dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Kurangnya pelatihan dan edukasi bagi pelaku usaha perikanan tentang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang modern dan berkelanjutan

## 2. 4 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2027

Sub bab ini menyajikan hasil review terhadap keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Agam yang diusulkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam

Tahun 2027. Review ini dilakukan untuk memastikan bahwa usulan kegiatan DKPP secara substansial, spasial, dan finansial mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD meliputi:

1. Keselarasan Program: Memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan DKPP berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang relevan, terutama yang berkaitan dengan misi penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Prioritas Kegiatan: Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan telah tergolong sebagai prioritas utama yang mampu mengatasi isu-isu strategis daerah, seperti penanganan kerawanan pangan, peningkatan diversifikasi pangan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.
3. Penyesuaian Indikator dan Reformulasi Target

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan validitas pengukuran kinerja, review Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 ini juga menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian indikator dan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKPP Tahun 2025-2029. Penyesuaian indikator dan perubahan target ini diperlukan sebagai tindak lanjut dari:

- Reformulasi Perhitungan: Terdapat reformulasi perhitungan pada beberapa indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk memenuhi standar pengukuran kinerja yang lebih akurat, relevan, dan *achievable*.
- Penyelarasan Data Dasar (Baseline): Penyesuaian dilakukan untuk memastikan *baseline* (data dasar) dan proyeksi target di Renstra (2025-2029) selaras dengan data yang divalidasi dan disepakati di tingkat daerah, sehingga target tahunan (dalam Renja 2027) menjadi lebih realistis dan terukur.

Dengan adanya penyesuaian indikator dan target ini, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan DKPP pada tahun 2027 dan seterusnya akan memiliki tolok ukur kinerja yang lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 4.**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Agam Tahun 2027**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Agam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Agam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Agam	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Agam	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	5.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Agam	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan di periksa Lingkup Perangkat Daerah	2	5.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Agam	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan di periksa Lingkup Perangkat Daerah	2	5.000.000	
	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Agam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	5.000.000	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Agam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	5.000.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Realisasi Penyaluran Anggaran Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.691.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Realisasi Penyaluran Anggaran Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.691.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Agam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn (orang/bulan)	23 Orang /Bulan	2.621.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Agam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn (orang/bulan)	23 Orang /Bulan	2.621.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Agam	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (laporan)	12	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Agam	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (laporan)	12	70.000.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)</b>	<b>94%</b>	<b>344.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)</b>	<b>94%</b>	<b>344.000.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Agam	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Agam	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	7.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Agam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Agam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	70.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Agam	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	17.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Agam	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	17.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Agam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Agam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	250.000.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)</b>	<b>12</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)</b>	<b>12</b>	<b>90.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Mebel	Kab. Agam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	4	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Agam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	4	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Agam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	7	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Agam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	7	30.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Agam	Jumlah Unit Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	1	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Agam	Jumlah Unit Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	1	10.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>584.000.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>584.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Agam	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	1	89.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Agam	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	1	89.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Agam	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	495.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Agam	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	495.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana(%)</b>	<b>90%</b>	<b>285.000.000</b>	<b>Kgiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana(%)</b>	<b>90%</b>	<b>285.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Agam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	43	230.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Agam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	43	230.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Agam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	2	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Agam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	2	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Agam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Agam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Agam	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas (unit)	1	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Agam	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas (unit)	1	20.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	<b>86</b>	<b>1.725.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	<b>86</b>	<b>1.725.000.000</b>	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab.Agam	Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia dan tersalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (%)	80%	800.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab.Agam	Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia dan tersalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (%)	80%	800.000.000	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Agam	Pangan berbasis Sumber daya lokal yang tersedia (laporan)	1	50.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Agam	Pangan berbasis Sumber daya lokal yang tersedia (laporan)	1	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab.Agam	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (laporan)	1	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab.Agam	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (laporan)	1	100.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab.Agam	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	150	250.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab.Agam	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	150	250.000.000	
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota	Kab.Agam	Jumlah Kegiatan Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kab/kota (laporan)	1	100.000.000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota	Kab.Agam	Jumlah Kegiatan Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kab/kota (laporan)	1	100.000.000	
	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Kab.Agam	Jumlah Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Unit)	1	100.000.000	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Kab.Agam	Jumlah Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Unit)	1	100.000.000	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	Kab.Agam	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	100.000.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	Kab.Agam	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	100.000.000	
	Pemantauan Stok Pangan	Kab.Agam	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	1	25.000.000	Pemantauan Stok Pangan	Kab.Agam	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	1	25.000.000	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan KOnsumen Wilayah Kab/Kota	Kab.Agam	Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kab/kota (Laporan)	12	25.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan KOnsumen Wilayah Kab/Kota	Kab.Agam	Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kab/kota (Laporan)	12	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab.Agam	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (laporan)	1	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab.Agam	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (laporan)	1	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab.Agam	Informasi Neraca bahan Makanan (NBM (Dokumen)	1	25.000.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab.Agam	Informasi Neraca bahan Makanan (NBM (Dokumen)	1	25.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah cadangan pangan kab/kota yang tersedia (Ton)</b>	<b>20</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah pengadaan cadangan pangan kab/kota yang tersedia (Ton)</b>	<b>20</b>	<b>500.000.000</b>	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Agam	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Agam	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	50.000.000	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (ton)	25	300.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (ton)	25	300.000.000	
	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Agam	Jumlah Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	50.000.000	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Agam	Jumlah Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	50.000.000	
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Agam	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	34	100.000.000	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Agam	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	34	100.000.000	
	<b>Kegiatan Penentuan harga minumum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah Dokumen Harga Minimum Pangan Daerah (Dokumen)</b>	<b>1</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Kegiatan Penentuan harga minumum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah Dokumen Harga Minimum Pangan Daerah (Dokumen)</b>	<b>1</b>	<b>25.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Agam	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan harga minimum Pangan pokok lokal (Laporan)	1	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Agam	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan harga minimum Pangan pokok lokal (Laporan)	1	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Kab.Agam</b>	Nilai Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/hari)	<b>2100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Kab.Agam</b>	Nilai Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/hari)	<b>2100</b>	<b>400.000.000</b>	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kabita Per tahun	Kab. Agam	Target KONsumsi Pangan Perkapita Pertahun (Dokumen)	1	100.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kabita Per tahun	Kab. Agam	Target KONsumsi Pangan Perkapita Pertahun (Dokumen)	1	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab.Agam	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)	1	225.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab.Agam	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)	1	225.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita per tahun	Kab. Agam	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per tahun (Laporan)	1	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita per tahun	Kab. Agam	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per tahun (Laporan)	1	75.000.000	
<b>3</b>	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Daerah Rentan Pangan (%)</b>	<b>4,3%</b>	<b>696.0000.000</b>	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Daerah Rentan Pangan (%)</b>	<b>4,3%</b>	<b>696.0000.000</b>	
	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah Peta yang tersusun (Peta)</b>	<b>1</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah Peta yang tersusun (Peta)</b>	<b>1</b>	<b>25.000.000</b>	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab.Agam	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	1	25.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab.Agam	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	1	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan yang Dilaksanakan (Kali)</b>	<b>1</b>	<b>671.000.000</b>	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan yang Dilaksanakan (Kali)</b>	<b>1</b>	<b>671.000.000</b>	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota (dokumen)	1	241.000.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota (dokumen)	1	241.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)	1	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)	1	200.000.000	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota (dokumen)	12	30.000.000	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota (dokumen)	12	30.000.000	
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab.Agam	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi (dokumen)	1	200.000.000	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab.Agam	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi (dokumen)	1	200.000.000	
<b>4</b>	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)</b>	<b>82%</b>	<b>199.000.000</b>	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)</b>	<b>82%</b>	<b>199.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah pelaku ushaa pangan segar yang diawasi (Pelaku Usaha)</b>	<b>40</b>	<b>199.000.000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah pelaku ushaa pangan segar yang diawasi (Pelaku Usaha)</b>	<b>40</b>	<b>199.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota (dokumen)	10	165.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota (dokumen)	10	165.000.000	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab.Agam	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	10	165.000.000	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab.Agam	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	10	165.000.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
5	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah produksi ikan tangkap (ton)</b>	<b>8,190</b>	<b>2.550.000.000</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah produksi ikan tangkap (ton)</b>			
	Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa & genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 2 (satu) daerah	Kab. Agam	Jumlah prasarana dan sarana perikanan tangkap yang tersedia (unit)	3	930.000.000	Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa & genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 2 (satu) daerah	Kab. Agam	Jumlah prasarana dan sarana perikanan tangkap yang tersedia (unit)	3	930.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya ikan	Kab. Agam	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kab/kota yang tersedia (dokumen)	1	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya ikan	Kab. Agam	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kab/kota yang tersedia (dokumen)	1	50.000.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Agam	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit)	1	400.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Agam	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit)	1	400.000.000	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Agam	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia (unit)	2	480.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Agam	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia (unit)	2	480.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan (Nelayan)</b>	<b>200</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan (Nelayan)</b>	<b>200</b>	<b>1.120.000.000</b>	
	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Kab. Agam	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	30	70.000.000	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Kab. Agam	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	30	70.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab.Agam	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	5	50.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab.Agam	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	5	50.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Kab. Agam	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan, pendanaa, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha (unit usaha)	10	50.000.000	Pelaksanaan Fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Kab. Agam	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan, pendanaa, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha (unit usaha)	10	50.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab.Agam	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit)	100	950.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab.Agam	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit)	100	950.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola (Unit)</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola (Unit)</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>	
	Penetapan Prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Kab. Agam	Jumlah SOP pengelolaan & penyelenggaraan TPI (Dokumen)	1	50.000.000	Penetapan Prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Kab. Agam	Jumlah SOP pengelolaan & penyelenggaraan TPI (Dokumen)	1	50.000.000	
	<b>Kegiatan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa &amp;genangan air isinya yang dapat</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah armada yang memiliki tanda daftar kapal perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota (kapal)</b>	<b>20</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah armada yang memiliki tanda daftar kapal perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota (kapal)</b>	<b>20</b>	<b>250.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>					<b>&amp; genangan air isinya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>					
	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT	Kab. Agam	Jumlah persyaratan & prosedur penebitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan kab/kota (dokumen)	1	50.000.000	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT	Kab. Agam	Jumlah persyaratan & prosedur penebitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan kab/kota (dokumen)	1	50.000.000	
	Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Agam	Jumlah Rekomendasi TDKP (Rekomendasi)	5	50.000.000	Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Agam	Jumlah Rekomendasi TDKP (Rekomendasi)	5	50.000.000	
	Penerbitan rekomendasi surat izin usaha perikanan (SIUP)	Kab. Agam	Jumlah Rekomendasi SIUP yang diterbitkan (Rekomendasi)	5	50.000.000	Penerbitan rekomendasi surat izin usaha perikanan (SIUP)	Kab. Agam	Jumlah Rekomendasi SIUP yang diterbitkan (Rekomendasi)	5	50.000.000	
	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi persetujuan Izin Usaha yang diterbitkan (Rekomendas)	5	50.000.000	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi persetujuan Izin Usaha yang diterbitkan (Rekomendas)	5	50.000.000	
	Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap	Kab. Agam	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	1	50.000.000	Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap	Kab. Agam	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	1	50.000.000	
	<b>Kegiatan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa &amp; genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Persentase rekomendasi Penerbitan izin pengadaan kapal 10 GT yang dikeluarkan (%)</b>	<b>5</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Kegiatan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa &amp; genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Persentase rekomendasi Penerbitan izin pengadaan kapal 10 GT yang dikeluarkan (%)</b>	<b>5</b>	<b>100.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						<b>(Satu daerah Kabupaten/kota</b>					
	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Agam	Jumlah Persyaratan & prosedur penerbitan rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan & kapal pengangkut yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1	50.000.000	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Agam	Jumlah Persyaratan & prosedur penerbitan rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan & kapal pengangkut yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1	50.000.000	
	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi persetujuan pengadaan kapal perikanan (PPKP) (Rekomendasi)	5	50.000.000	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi persetujuan pengadaan kapal perikanan (PPKP) (Rekomendasi)	5	50.000.000	
	<b>Pendaftaran Kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa &amp; genangan air lainnya</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah rekomendasi pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa &amp; genangan air lainnya yang dikeluarkan (Rekomendasi)</b>	<b>5</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pendaftaran Kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa &amp; genangan air lainnya</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah rekomendasi pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa &amp; genangan air lainnya yang dikeluarkan (Rekomendasi)</b>	<b>5</b>	<b>100.000.000</b>	
	Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Agam	Jumlah Persyaratan & prosedur penerbitan rekomendasi buku kapal perikanan kewenangan Kab/kota (dokumen)	1	50.000.000	Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Agam	Jumlah Persyaratan & prosedur penerbitan rekomendasi buku kapal perikanan kewenangan Kab/kota (dokumen)	1	50.000.000	
	Penerbitan Rekomendasi buku kapal perikanan (BKP)	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi buku kapal perikanan yang diterbitkan (Rekomendasi)	5	50.000.000	Penerbitan Rekomendasi buku kapal perikanan (BKP)	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi buku kapal perikanan yang diterbitkan (Rekomendasi)	5	50.000.000	
<b>6</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)</b>	<b>33,900</b>	<b>1.043.000.000</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)</b>	<b>33,900</b>	<b>1.043.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (Orang)</b>	<b>11</b>	<b>313.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (Orang)</b>	<b>11</b>	<b>313.000.000</b>	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab.Agam	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)	5	253.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab.Agam	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)	5	253.000.000	
	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	Kab.Agam	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)	2	20.000.000	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	Kab.Agam	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)	2	20.000.000	
	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Kab.Agam	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha (Kelompok)	2	20.000.000	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Kab.Agam	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha (Kelompok)	2	20.000.000	
	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kab.Agam	Jumlah Kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Kelompok)	2	20.000.000	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kab.Agam	Jumlah Kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Kelompok)	2	20.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Produktivitas rata-rata unit usaha pembudidayaan ikan dalam satu tahun (Ton/UnitUsaha/Tahun)</b>	<b>2,68</b>	<b>730.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Produktivitas rata-rata unit usaha pembudidayaan ikan dalam satu tahun (Ton/UnitUsaha/Tahun)</b>	<b>2,68</b>	<b>730.000.000</b>	
	Pengembangan Kapasitas pembudi daya ikan kecil	Kab. Agam	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	1	20.000.000	Pengembangan Kapasitas pembudi daya ikan kecil	Kab. Agam	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	1	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	1	400.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	1	400.000.000	
	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah kabuapten/Kota	Kab. Agam	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)	2	20.000.000	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah kabuapten/Kota	Kab. Agam	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)	2	20.000.000	
	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Kab. Agam	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota (Dokumen)	12	20.000.000	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Kab. Agam	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota (Dokumen)	12	20.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	2	200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Agam	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	2	200.000.000	
	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Kab.Agam	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat (Unit)	10	20.000.000	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Kab.Agam	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat (Unit)	10	20.000.000	
	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Kab.Agam	Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan	1	50.000.000	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Kab.Agam	Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan	1	50.000.000	
7	<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap pertauran (%)</b>	<b>45%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap pertauran (%)</b>	<b>45%</b>	<b>90.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi sesuai kewenangan kab/kota (Pelaku Usaha)</b>	<b>27</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi sesuai kewenangan kab/kota (Pelaku Usaha)</b>	<b>27</b>	<b>90.000.000</b>	
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab.Agam	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	10	30.000.000	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab.Agam	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	10	30.000.000	
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Agam	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	5	15.000.000	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Agam	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	5	15.000.000	
	Pembentukan Sumber daya Manusia pengawasan sumber daya perikanan	Kab. Agam	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibentuk (Orang)	2	15.000.000	Pembentukan Sumber daya Manusia pengawasan sumber daya perikanan	Kab. Agam	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibentuk (Orang)	2	15.000.000	
<b>8</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)</b>	<b>32,19</b>	<b>720.000.000</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)</b>	<b>32,19</b>	<b>720.000.000</b>	
	<b>Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah bahan baku ikan segar yang diolah</b>	<b>2305</b>	<b>520.000.000</b>	<b>Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah bahan baku ikan segar yang diolah</b>	<b>2305</b>	<b>520.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Agam	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku Usaha)	20	320.000.000	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Agam	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku Usaha)	20	320.000.000	
	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Agam	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/kota (ton)	29,073	200.000.000	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Agam	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/kota (ton)	29,073	200.000.000	
	<b>Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah tanda daftar usaha perikanan yang diterbitkan</b>	<b>12</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil</b>	<b>Kab. Agam</b>	<b>Jumlah tanda daftar usaha perikanan yang diterbitkan</b>	<b>12</b>	<b>200.000.000</b>	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan berusaha pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan skala mikro dan kecil dengan penanaman modal dalam negeri	Kab. Agam	Penetapan persyaratan dan prosedur perizinan pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan berusaha surat izin jasa pasca panen penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	1	50.000.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan berusaha pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan skala mikro dan kecil dengan penanaman modal dalam negeri	Kab. Agam	Penetapan persyaratan dan prosedur perizinan pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan berusaha surat izin jasa pasca panen penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	1	50.000.000	
	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Rekomendasi)	5	50.000.000	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Rekomendasi)	5	50.000.000	
	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan	5	50.000.000	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil	Kab. Agam	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan	5	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	resiko		skala usaha dan tingkat resiko (Rekomendasi)			perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat resiko		skala usaha dan tingkat resiko (Rekomendasi)			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah kab/kota berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	Kab.Agam	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	1	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah kab/kota berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	Kab.Agam	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	1	50.000.000	

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI

Penyusunan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tahun 2027 dilakukan dengan mengacu pada urusan dan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses perencanaan ini juga mempertimbangkan target kinerja urusan pangan dan perikanan yang ditetapkan pemerintah pusat, meliputi peningkatan ketahanan pangan, peningkatan konsumsi ikan, penguatan kontribusi PDRB sektor perikanan, serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Dalam rangka memastikan sinkronisasi perencanaan daerah, penyusunan Renja DKPP Tahun 2027 didahului dengan telaahan terhadap berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang menjadi pedoman pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Telaahan tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, program, dan sasaran daerah dengan prioritas pembangunan yang lebih tinggi tingkatannya.

1. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, khususnya agenda:
  - Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas dan konsumsi pangan;
  - Peningkatan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;
  - Penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat;

- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
2. Rencana strategi kementerian kelautan dan perikanan (KKP) Tahun 2025 – 2029, yang menekankan:
    - Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan,
    - Penguatan daya saing produk perikanan,
    - Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya,
    - Pengawasan SDKP berbasis masyarakat dan teknologi.
  3. Rencana Strategi Badan Pangan Nasional / Kementrian Pertanian, yang mengarah pada:
    - Peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman pangan,
    - Penguatan cadangan pangan daerah,
    - Percepatan diversifikasi pangan lokal.
  4. RPJMD Provinsi Tahun 2025 – 2029, terutama arah kebijakan:
    - Peningkatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal,
    - Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing,
    - Penurunan kemiskinan pesisir dan perbaikan tata kelola sumber daya perikanan,
    - Penguatan sinergi perencanaan daerah sektoral.
  5. Program Strategis Nasional sebagai bagian dari penyelarasan tujuan pembangunan nasional terutama arah kebijakan:
    - Peningkatan dan Penguatan Ketahanan Pangan
    - Makanan Bergizi Gratis
    - Pengendalian Inflasi

Perumusan arah kebijakan diperlukan untuk menjamin keterpaduan antara pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan kebijakan nasional dan daerah, serta memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini merupakan penjabaran teknis dari rangkaian kerja yang mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, serta selaras dengan strategi dan fokus pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Penyusunan arah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam merancang program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras, efektif, dan berkontribusi nyata terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan target strategis organisasi yang bersifat kualitatif dan menjadi prioritas tertinggi dalam rencana kerja PD yang merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaras dengan Visi Kabupaten Agam yang diintervensi melalui **Misi IV**, yaitu ***Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Berkeadilan***. Misi ini dijabarkan lebih lanjut melalui **Tujuan Pembangunan Daerah**, yaitu **Tujuan 1: Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Kuat, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**, dengan sasaran *meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan*. Selain itu, berkaitan erat pula dengan **Tujuan 2: Menurunnya Angka**

**Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah**, dengan sasaran *meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah*. Sejalan dengan kerangka visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menetapkan Tujuan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam yaitu **Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB**.

Tujuan ini diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan, penanganan kerawanan pangan, peningkatan konsumsi pangan B2SA dan pengawasan keamanan pangan, peningkatan konsumsi ikan, penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha perikanan, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perikanan. Dengan demikian, tujuan strategis ini menjadi landasan bagi penyusunan sasaran, program, dan kegiatan yang terarah, terukur, dan terintegrasi, sehingga mendukung tercapainya ketahanan pangan masyarakat, peningkatan daya saing pelaku usaha perikanan, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam yang dijabarkan dalam misi 4 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.**  
**Proyeksi Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Kabupaten Agam**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Misi 4 : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan					
1	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan Daerah serta Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan keamanan pangan	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	8,35	8,66
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	*	81
		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	41.874,91	42.090

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Program Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), diperlukan analisis komprehensif terhadap berbagai faktor strategis agar arah kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan daerah. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam

menentukan fokus intervensi, penetapan sasaran, serta penyusunan kegiatan yang efektif, terukur, dan berdaya guna. Adapun bahan pertimbangan utama dalam perumusan program dan kegiatan DKPP adalah sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Program dan kegiatan DKPP disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya terkait peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi perikanan. Seluruh kegiatan diarahkan agar berkontribusi nyata terhadap agenda pembangunan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan sumber daya pangan dan perikanan.

#### 2. Pengentasan Kemiskinan

Sektor pangan dan perikanan memiliki kontribusi langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Pertimbangan ini mendorong DKPP untuk merumuskan program yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha pangan dan perikanan, memperkuat akses pangan bagi rumah tangga miskin, menurunkan kerentanan pangan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat . pengadaan bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan, pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah, pelatihan pengolahan pangan lokal dan stabilisasi harga pangan menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

#### 3. Pemenuhan NSPK dan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Program DKPP mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimum (SPM), Arah kebijakan ini merupakan penjabaran teknis dari rangkaian kerja yang mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, serta selaras dengan strategi dan fokus pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Penyusunan arah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam merancang program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras, efektif, dan berkontribusi nyata terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis.

#### 4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Rumusan program DKPP mempertimbangkan potensi unggulan daerah seperti:

- a. komoditas pangan lokal,
- b. potensi perikanan budidaya dan perairan umum,
- c. peluang investasi sektor pangan dan perikanan,
- d. keberadaan sentra produksi dan pasar lokal.

Pemanfaatan potensi tersebut menjadi dasar pengembangan program penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan perikanan, serta penciptaan nilai tambah bagi pelaku usaha.

#### 5. Pengembangan Daerah Rentan Pangan

Daerah terpencil atau terisolir sering menghadapi keterbatasan akses pangan dan sarana ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan program DKPP mempertimbangkan:

- a. wilayah dengan akses pangan rendah,
- b. wilayah rentan pangan berdasarkan SKPG/FSVA,
- c. kondisi geografis sulit,

d. keterbatasan akses distribusi dan infrastruktur.

Kegiatan seperti penguatan cadangan pangan, pembangunan sarana distribusi, dan intervensi pangan untuk wilayah prioritas diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah karena semakin tinggi persentase wilayah rentan pangan, semakin banyak daerah yang menghadapi risiko kerawanan pangan. Sebaliknya, semakin rendah persentase wilayah rentan pangan, semakin aman distribusi pangan dan semakin kecil daerah yang mengalami kerentanan

## 6. Aspirasi Masyarakat dan Stakeholder

Masukan dari Musrenbang, aspirasi pelaku usaha perikanan dan pangan, forum konsultasi publik, serta koordinasi lintas sektor menjadi pertimbangan penting dalam memastikan program DKPP sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung kesejahteraan pelaku usaha.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan untuk rencana kerja tahun 2027 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

#### **1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
  - 2.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**
    1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.
    2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
    3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
  - 2.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**
    1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 2.3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

### **3. Program Program Penanganan Kerawanan Pangan**

#### **3.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

#### **3.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

### **4. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

#### **4.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

1. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

### **5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

#### **5.1 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil

## **6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

### **6.1 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.

### **6.2 Pengelolaan Pembudidaya Ikan**

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

## **7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

### **7.1 Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**

1. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota.

## **8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

### **8.1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko

### **8.2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diusulkan pada Renja 2026 , DKPP memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang baik bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Selain itu, rencana kerja ini juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi capaian kinerja sehingga pelaksanaan pembangunan di sektor pangan dan perikanan dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Agam**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>								
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN (%)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>100</b>	<b>4.014.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>100</b>	<b>4.017.000.000</b>
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD (%)	Kab. Agam	100	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	20.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Agam	7	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Agam	6	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	5.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Kab. Agam	2	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	5.000.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah (Dokumen)	Kab. Agam	1	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	5.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase Realisasi Penyaluran Anggaran Perangkat Daerah (%)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>100</b>	<b>2.691.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>100</b>	<b>2.694.000.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn (orang/bulan)	Kab.Agam	24 Orang/Bulan	2.621.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Orang/Bulan	2.624.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (laporan)	Kab.Agam	12	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	70.000.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>94</b>	<b>344.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>95</b>	<b>344.000.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Kab.Agam	1	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	7.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Kab.Agam	1	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	70.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Kab.Agam	1	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	17.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Prakiran Maju Rencana Tahun 2028		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Kab.Agam	1	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	250.000.000
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)</b>	<b>Kab.Agam</b>			<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	Kab.Agam			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab.Agam</b>			<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	Kab.Agam			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	Kab.Agam			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana(%)</b>	<b>Kab.Agam</b>			<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Prakiran Maju Rencana Tahun 2028		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	Kab.Agam	3	115.679.594,99	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43	230.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Kab.Agam	1	4.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas (unit)	Kab.Agam	1	4.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	20.000.000
<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>85.5</b>	<b>716.744.357</b>			<b>86</b>	<b>811.000.000</b>
<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia dan tersalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (%)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>80%</b>	<b>363.889.760</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>80%</b>	<b>375.000.000</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (laporan)	Kab.Agam	1	98.244.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	100.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	Kab.Agam	130	249.307.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150	250.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (laporan)	Kab.Agam	1	16.337.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	25.000.000
<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengadaan cadangan pangan kab/kota yang tersedia (Ton)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>10</b>	<b>240.950.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>25</b>	<b>300.000.000</b>
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (ton)	Kab.Agam	10	240.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25	300.000.000
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz</b>	<b>Nilai Angka Kecukupan Energi (kcal/kapita/hari)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>2100</b>	<b>111.904.597</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>2100</b>	<b>136.000.000</b>
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)	Kab.Agam	1	111.904.597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	136.000.000
<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Persentase Daerah Rentan Pangan (%)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>5.4%</b>	<b>277.950.019</b>			<b>4.3%</b>	<b>696.000.000</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Prakiran Maju Rencana Tahun 2028		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Jumlah Peta yang tersusun (Peta)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>1</b>	<b>17.264.876</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>1</b>	<b>25.000.000</b>
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	Kab.Agam	1	17.264.876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	25.000.000
<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan yang Dilaksanakan (Kali)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>1</b>	<b>260.685.143</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>1</b>	<b>671.000.000</b>
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota (dokumen)	Kab.Agam	1	71.820.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	241.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)	Kab.Agam	1	89.929.167	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	200.000.000
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota (dokumen)	Kab.Agam	12	12.406.976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	30.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi (dokumen)	Kab.Agam	1	86.528.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	200.000.000
<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>81</b>	<b>79.529.752</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>82%</b>	<b>34.000.000</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku ushaa pangan segar yang diawasi (Pelaku Usaha)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>20</b>	<b>79.529.752</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>10</b>	<b>34.000.000</b>
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	Kab.Agam	10	79.529.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	34.000.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>3.423.715.010</b>				<b>1.553.000.000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>3.423.715.010</b>				<b>1.553.000.000</b>
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah produksi ikan tangkap (ton)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>8180</b>	<b>2.291.968.139</b>			<b>8.190</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan (Nelayan)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>30</b>	<b>2.291.968.139</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>30</b>	<b>100.000.000</b>
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	Kab.Agam	5	17.459.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	50.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit)	Kab.Agam	100	2.274.509.039	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus		100	950.000.000
<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>33.775</b>	<b>758.720.214</b>			<b>33.900</b>	<b>853.000.000</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (Orang)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>13</b>	<b>543.842.214</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>5</b>	<b>253.000.000</b>
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)	Kab.Agam	5	543.842.214	Dana Transfer Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus		5	253.000.000
<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Produktivitas rata-rata unit usaha pembudidayaan ikan dalam satu tahun (Ton/UnitUsaha/Tahun)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>2,66</b>	<b>214.878.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>2.68</b>	<b>600.000.000</b>
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	Kab.Agam	1	100.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus		1	400.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	Kab.Agam	2	214.778.000	Dana Transfer Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus		2	200.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap pertauran (%)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>30%</b>	<b>72.710.316</b>			<b>45%</b>	<b>30.000.000</b>
<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi sesuai kewenangan kab/kota (Pelaku Usaha)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>20</b>	<b>72.710.316</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>10</b>	<b>30.000.000</b>
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	Kab.Agam	20	72.710.316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	30.000.000
<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>31.62</b>	<b>300.316.341</b>			<b>32.19</b>	<b>570.000.000</b>
<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah tanda daftar usaha perikanan yang diterbitkan</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>1</b>	<b>5.677.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>1</b>	<b>50.000.000</b>
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	Kab.Agam	1	5.677.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	50.000.000
<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah bahan baku ikan segar yang diolah (Ton)</b>	<b>Kab.Agam</b>	<b>2286</b>	<b>294.639.341</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana</b>		<b>32.19</b>	<b>520.000.000</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Prakiran Maju Rencana Tahun 2028		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					<b>Alokasi Umum</b>			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (ton)	Kab.Agam	28.927	84.614.702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29,073	200.000.000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)	Kab.Agam	10	210.024.639	Dana Transfer Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus		20	320.000.000
<b>Jumlah</b>								<b>7.003.000.000</b>
				<b>8.395.262.807,75</b>				

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

---

### 4.1. Keterkaitan Rencana Kerja dengan RPJMD Kabupaten Agam 2025-2029

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tahun 2026. Renja ini menjabarkan program dan kegiatan DKPP yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, yang secara substansial berkontribusi pada upaya mewujudkan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Perumusan kebijakan dan program kerja DKPP mempertimbangkan permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis daerah. Hal ini selaras dengan **Visi Kabupaten Agam Tahun 2025-2029**, yaitu:

#### **“Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera”**

Visi tersebut diuraikan melalui empat kata kunci utama:

- **Agam Madani:** Masyarakat yang religius, beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat, serta berlandaskan pada falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*". Dicitrakan dengan semangat gotong royong, menghormati perbedaan, dan bahu-membahu dalam kebaikan serta penguatan keimanan.
- **Maju:** Kabupaten yang berkembang secara terpadu, mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan warganya secara berkelanjutan.

- **Adil:** Tercapainya keseimbangan dan pemerataan hasil pembangunan secara proporsional dan profesional, meliputi aspek kewilayahan, sektor kehidupan, kelompok sosial, serta dimensi jasmani dan rohani.
- **Sejahtera:** Terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat dan damai, serta adanya rasa aman, nyaman, dan peluang untuk mencapai potensi penuh.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, pembangunan lima tahun ke depan dilaksanakan melalui **6 (Enam) Misi Pembangunan Kabupaten Agam:**

- a) Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai"
- b) Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
- c) Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
- d) Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
- e) Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana
- f) Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja DKPP Tahun 2026 merupakan kontribusi konkret DKPP dalam pencapaian Misi-Misi tersebut, terutama Misi **(d) Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.**

#### 4.2. Isu Strategis dan Program Prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renja DKPP Tahun 2026 didasarkan pada analisis Isu Strategis Perangkat Daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 164 ayat (4), Isu Strategis Daerah harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Seluruh program dan kegiatan DKPP Tahun 2026 dirancang untuk secara langsung menjawab permasalahan dan tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berdasarkan tugas dan fungsi DKPP sesuai Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022, berikut adalah program, isu strategis yang harus dijawab, dan arah kegiatan utama:

NO	Program	Isu Strategis Utama yang Dijawab	Arah Kegiatan Utama
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Struktur organisasi, distribusi SDM, minimnya pelatihan, keterbatasan sarana prasarana, efektivitas pengelolaan keuangan, kapasitas fiskal, optimalisasi digitalisasi layanan, dan pengendalian internal yang belum optimal.	Peningkatan kompetensi SDM, perbaikan tata kelola, pemenuhan sarana prasarana, serta digitalisasi dan sistem informasi layanan.
2.	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	Belum adanya regulasi daerah ketahanan pangan, layanan LDPM yang belum merata, kurangnya edukasi gizi, dan pemanfaatan pekarangan yang belum optimal.	Penguatan kelembagaan pangan, penyusunan regulasi, pendidikan gizi, dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan berkelanjutan

			(misalnya melalui KRPL).
3.	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	Masih adanya daerah rawan pangan, kemiskinan sebagai faktor pembatas akses pangan, ketergantungan impor pangan, dampak perubahan iklim, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga.	Penguatan cadangan pangan (lumbung pangan nagari), peningkatan intervensi pada wilayah rentan, dan perbaikan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kerawanan pangan.
4.	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	Penggunaan bahan berbahaya pada pangan segar, terbatasnya SDM dan anggaran pengawasan, lemahnya sanksi, dan kurangnya pengetahuan/akses informasi keamanan pangan masyarakat.	Intensifikasi pengawasan (Registrasi izin edar PSAT), peningkatan kapasitas pengawas, serta edukasi dan penyediaan informasi kepada masyarakat (sekolah pangan gizi).
5.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	Dampak perubahan iklim terhadap habitat/migrasi ikan, meningkatnya ancaman fenomena alam ekstrem, dan keterbatasan data sumber daya ikan.	Peningkatan adaptasi perubahan iklim, penguatan kualitas data perikanan, serta pemenuhan sarana pendukung perikanan tangkap.
6.	<b>Program</b>	Pencemaran lingkungan dari	Peningkatan kualitas

	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	kegiatan budidaya, keterbatasan SDM/anggaran pengelolaan, dan perlunya penerapan budidaya berkelanjutan (termasuk Program Save Maninjau).	budidaya, pelatihan pembudidaya, serta penerapan standar budidaya yang ramah lingkungan.
7.	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	Rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan SDM/sarana pengawasan, tingginya kegiatan penangkapan ilegal, degradasi ekosistem, dan monitoring yang belum berbasis data terpadu.	Penguatan pengawasan dan patroli, pelibatan masyarakat, serta pengembangan sistem monitoring berbasis data terpadu.
8.	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap teknologi modern, kurangnya SDM kompeten dalam pengolahan/pemasaran, dan minimnya pelatihan berkelanjutan.	Peningkatan keterampilan pelaku usaha, fasilitasi akses teknologi, penguatan rantai pemasaran, dan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).

### 4.3. Langkah Strategis dan Hasil yang Diharapkan

Dalam rangka pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan, DKPP Kabupaten Agam berfokus pada pembangunan sektor pangan berbasis rumah tangga untuk meningkatkan kemandirian dan keamanan pangan non-beras, bahkan menjangkau daerah terisolir. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan DKPP pada tahun 2026 meliputi:

- Penguatan cadangan pangan dan edukasi diversifikasi pangan.
- Pengembangan Nagari Mandiri Pangan dan lumbung pangan nagari.

- Penyusunan kebijakan daerah tentang ketahanan pangan.
- Penguatan Program "Save Maninjau" untuk kelestarian perikanan budidaya dan lingkungan.
- Peningkatan sarana dan prasarana kelompok perikanan serta fasilitasi permodalan.
- Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) secara massif.
- Peningkatan daya saing produk perikanan melalui pengolahan dan pemasaran modern.

Kegiatan DKPP menargetkan hasil yang optimal, yaitu ketersediaan pangan yang memadai dan keberagaman hasil pangan untuk konsumsi masyarakat, khususnya dalam skala rumah tangga, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan, gizi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, beserta alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2026, akan disajikan secara rinci dalam tabel terlampir pada bagian akhir Bab ini.

**Tabel 7**

**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket.
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,5	716.744.357	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pangan pokok atau pangan lainnya yang tersedia dan tersalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (%)	80%	363.889.760	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (laporan)	1	98.244.940	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (KK)	130	249.307.320	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	1	16.337.500	
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota</b>	<b>Jumlah cadangan pangan kab/kota yang tersedia (Ton)</b>	<b>10</b>	<b>240.950.000</b>	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (ton)	10	240.950.000	
<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Nilai Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/hari)</b>	<b>2100</b>	<b>111.904.597</b>	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)	1	111.904.597	
<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Persentase Daerah Rentan Pangan (%)</b>	<b>5,4%</b>	<b>277.950.019</b>	
<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Jumlah peta yang tersusun (Peta)</b>	<b>1</b>	<b>17.264.876</b>	
Penyusunan, pemutakhiran dan Analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisa ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	1	17.264.876	
<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota</b>	<b>Jumlah penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan (Kali)</b>	<b>1</b>	<b>260.685.143</b>	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ( Dokumen)	1	71.820.400	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kab/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kab/kota (laporan)	1	89.929.167	
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	86.528.600	
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12.406.976	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket.
<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)</b>	<b>81%</b>	<b>79.529.752</b>	
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha pangan segar yang diawasi (Pelaku Usaha)</b>	<b>20</b>	<b>79.529.752</b>	
Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	10	79.529.752	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.897.323.669,75</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Penyaluran Anggaran Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.002.878.225,1</b> <b>9</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang/Bulan)	22	2.935.253.225,1 9	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	67.625.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)</b>	<b>92%</b>	<b>180.790.395,5</b> <b>7</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.474.800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	1	44.922.475	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Paket)	1	9.619.200	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	121.773.920,5 7	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</b>	<b>5</b>	<b>7.903.730</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	5	7.903.730	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)</b>	<b>12</b>	<b>580.841.724</b>	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	1	86.375.724	
<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	494.466.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana (%)</b>	<b>90%</b>	<b>124.909.594,9</b> <b>9</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	43	115.679.594,9 9	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	2	4.680.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	1	4.550.000	
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)</b>	<b>8180</b>	<b>2.291.968.139</b>	
<b>Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota</b>	<b>Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan (Nelayan)</b>	<b>200</b>	<b>2.291.968.139</b>	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (Kelompok)	10	17.459.100	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala kecil	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil (Unit)	100	2.274.509.039	
<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>33775</b>	<b>758.720.214</b>	
<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (Kelompok)</b>	<b>13</b>	<b>543.842.214</b>	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	<b>5</b>	543.842.214	
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Produktivitas rata-rata unit usaha pembudidayaan ikan dalam satu tahun (Ton/Unit Usaha/Tahun)</b>	<b>2,66</b>	<b>214.878.000</b>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket.
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	100.000	
Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	214.778.000	
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap peraturan</b>	<b>30%</b>	<b>72.710.316</b>	
<b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam kab/kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)</b>	<b>20</b>	<b>72.710.316</b>	
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	20	72.710.316	
<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Angka Konsumsi Ikan</b>	<b>31,62</b>	<b>300.316.341</b>	
<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah tanda daftar usaha perikanan yang diterbitkan</b>	<b>1</b>	<b>5.677.000</b>	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	1	5.677.000	
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah bahan baku ikan segar yang diolah</b>	<b>2286</b>	<b>294.639.341</b>	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (Ton)	28.927	86.614.702	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	210.024.639	
<b>Total Anggaran</b>			<b>8.395.262.8207,75</b>	

## PENUTUP

---

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Agam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang berfungsi sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup DKPP. Penyusunan dokumen ini telah dilaksanakan secara terstruktur, partisipatif, dan berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja DKPP Tahun 2026 merupakan penjabaran yang lebih detail dari program-program strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DKPP Tahun 2025-2029. Proses ini menjamin adanya koherensi vertikal antara kebijakan nasional, provinsi, hingga daerah, serta koherensi horizontal antar-sektor pembangunan di Kabupaten Agam. Dengan demikian, seluruh alokasi sumber daya dan upaya DKPP dipastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Agam dalam lima tahun ke depan, terutama dalam aspek peningkatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi daerah berbasis nagari.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

1. Evaluasi Kinerja Masa Lalu: Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya menjadi dasar penentuan tingkat keberhasilan dan identifikasi masalah, sehingga kegiatan di tahun 2026

dirancang untuk mengatasi kelemahan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai.

2. Isu Strategis dan Tantangan: Program kerja difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis terkini di sektor pangan dan perikanan, termasuk dampak perubahan iklim, kerawanan pangan, dan kebutuhan akan diversifikasi pangan lokal.
3. Potensi dan Sumber Daya: Mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal di Kabupaten Agam untuk mencapai kemandirian pangan dan keberlanjutan sektor perikanan.

Keberhasilan implementasi Renja DKPP Tahun 2026 sangat bergantung pada faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, terdapat beberapa catatan penting yang memerlukan perhatian khusus:

1. Kebutuhan Koordinasi dan Sinergi: Pelaksanaan program ketahanan pangan dan perikanan bersifat multisektoral. Diperlukan upaya sinergi yang berkelanjutan dengan Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya untuk menghindari duplikasi program dan memastikan efektivitas intervensi di lapangan.
2. Partisipasi Masyarakat: Program pengembangan lumbung pangan nagari, KRPL, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat (kelompok tani, kelompok nelayan, POKDAKAN). Keberhasilan program akan ditentukan oleh tingkat adopsi dan kemandirian masyarakat dalam melanjutkan kegiatan.

3. Pengamanan Anggaran (Mitigasi Risiko Fiskal): Mengingat keterbatasan dan dinamika kapasitas fiskal daerah, risiko penyesuaian anggaran harus dimitigasi sejak dini.

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Seluruh aktivitas, mulai dari perencanaan teknis, pengadaan barang/jasa, hingga pelaporan di lingkungan DKPP, harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen publik yang baik (*Good Public Governance*):

- Asas Akuntabilitas: Setiap rupiah yang digunakan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus didukung oleh dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
- Asas Profesionalitas: Pelaksana kegiatan harus memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam aspek teknis ketahanan pangan, perikanan tangkap, dan budidaya, sebagaimana diupayakan melalui Program Penunjang (peningkatan SDM).
- Asas Efisiensi dan Efektivitas: Seluruh sumber daya yang dialokasikan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai target kinerja dengan biaya yang paling rasional, serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang signifikan bagi masyarakat.
- Asas Keterbukaan (Transparansi): Informasi mengenai program, kegiatan, anggaran, dan hasil capaian harus tersedia dan dapat diakses oleh publik sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap kinerja DKPP.
- Asas Kepatuhan: Pelaksanaan wajib tunduk pada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta kebijakan teknis terkait sektor pangan dan perikanan.

## 5.2. Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut

Renja ini tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga alat pengendalian pembangunan. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja DKPP Tahun 2026 akan dilakukan melalui mekanisme:

1. Pengendalian Internal: Melalui *monitoring* dan evaluasi triwulanan yang dipimpin langsung oleh Kepala DKPP untuk mengidentifikasi deviasi kinerja dan mengambil langkah korektif yang cepat.
2. Evaluasi Eksternal: Melalui evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat, Bappeda, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Setelah dokumen Renja ini ditetapkan, langkah-langkah tindak lanjut yang akan segera dilakukan meliputi:

1. Integrasi ke DPA: Mengintegrasikan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sudah final ini ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Perjanjian Kinerja (PK): Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja DKPP dengan Bupati Agam, yang memuat komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahunan.
3. Implementasi Teknis: Melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA, diikuti dengan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk memastikan keseragaman dan kualitas hasil.
4. Pelaporan Kinerja: Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam di akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja DKPP.

5. Perencanaan Tahun Berikutnya: Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 akan dijadikan masukan utama dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Perikanan Kabupaten Agam



ROVA DESWIRA, S.Pi, M.Si  
Pembina Tk I/ IV.b  
NIP. 19721209 200604 2 007